

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Administrasi publik adalah cabang dari ilmu administrasi yang mencakup berbagai konsep. Terdapat beberapa istilah yang sering digunakan untuk menggambarkaninya, pertama adalah "*administration of public*" yang berarti administrasi dari publik. Kedua, "*administration for public*" yang berarti administrasi untuk publik, dan ketiga, "*administration by public*" yang berarti administrasi oleh publik (Keban, 2004:9).

Istilah "*administration of public*" berarti pemerintah bertindak sebagai aktor tunggal yang berkuasa atau sebagai regulator yang proaktif dalam mengatur dan mengambil keputusan yang mereka anggap terbaik untuk masyarakat. Dalam konteks ini, masyarakat dianggap pasif, kurang kompeten, dan harus mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Keputusan-keputusan yang diambil oleh negara untuk mengatasi masalah-masalah publik mengarah pada lahirnya istilah kebijakan publik. Menurut para ahli, seperti yang dijelaskan oleh Thomas R. Dye dalam Leo Agustino (2014:7), kebijakan publik adalah pilihan-pilihan yang dibuat oleh pemerintah mengenai apa yang akan atau tidak akan mereka lakukan. Pada proses kebijakan publik, kebijakan dianggap sebagai suatu proses yang melibatkan langkah-langkah praktis seperti pembuatan, implementasi, dan perubahan kebijakan.

Implementasi kebijakan adalah tahap setelah kebijakan ditetapkan, baik dalam bentuk undang-undang maupun peraturan. Di Indonesia sendiri memiliki kebijakan yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 mengenai Perumahan dan Kawasan Permukiman. Peraturan ini dibuat sebagai target RPJMN tahun 2015-2019 untuk menciptakan kota bebas kumuh.

Sebagai wujud pencapaian RPJMN tersebut, Direktorat Jenderal Cipta Karya membentuk suatu Program bernama Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) yang dimuat dalam SE. DJCK No.110, 2016 serta mendorong gerakan 100-0-100. Dengan arti 100% akses merata pada pasokan air minum, 0% tidak ada permukiman yang kumuh, dan 100% akses pada sanitasi yang memadai.

Peraturan ini dibuat oleh pemerintah pusat untuk mencegah dan meningkatkan kualitas permukiman kumuh yang ada di Indonesia. Implementasi kebijakan ini mencakup pelaksanaan undang-undang di mana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama untuk mencapai tujuan kebijakan. Gonsalves dalam Iqbal (2005) menjelaskan bahwa aktor implementasi adalah mereka yang memberikan dampak atau yang terkena dampak dari kebijakan, program, dan aktivitas tersebut.

Setiap aktor yang terlibat dalam proses implementasi kebijakan ini memiliki peran yang berbeda-beda. Riant Nugroho (2014) mengungkapkan peran aktor dalam proses pembangunan berdasarkan kedudukannya, meliputi peran sebagai pembuat kebijakan, koordinator, fasilitator, pelaksana, dan pendukung. Kemudian Mathis (2000) mengungkapkan tiga peran aktor dalam mengembangkan suatu

objek pariwisata, meliputi peran sebagai regulator, fasilitator, serta pengelola dan pelaksana.

Selain itu juga, Chifos (2007) dan Meneses (2005) peran aktor dalam pengembangan suatu kelompok masyarakat, yaitu meliputi peran sebagai regulator, pemberdayaan, pendampingan, dan penguatan. Berdasarkan permasalahan terkait wilayah perumahan dan kawasan permukiman kumuh ini, membuat Walikota Semarang juga mengeluarkan Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor 050/801/2014 tentang Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kota Semarang. Dokumen ini memberikan gambaran tentang wilayah-wilayah kumuh yang ada di Kota Semarang yang tersebar di 63 kelurahan dengan luas $\pm 415,83$ Ha atau seluas $\pm 12\%$ dari wilayah Kota Semarang.

Dengan adanya permasalahan permukiman kumuh, membuat Pemerintah Kota Semarang harus menerapkan kebijakan KOTAKU untuk melakukan perubahan sosial ekonomi masyarakat serta sarana infrastruktur. Program KOTAKU dipilih dengan tujuan untuk mentransformasi wilayah perkampungan yang kumuh menjadi lebih tertata rapih, memperluas wilayah penghijauan, lebih aktif melibatkan dan memberdayakan masyarakat sekitar, memperbaiki lingkungan sekitar supaya dapat lebih baik, dan bisa meningkatkan potensi sosial ekonomi masyarakat sekitar. Untuk melaksanakan Kebijakan KOTAKU di wilayah Kampung Wonosari membutuhkan dukungan dari berbagai aktor seperti aktor dalam sektor pemerintahan, swasta, dan masyarakat.



Gambar 1. 1 Keadaan Sebelum Dan Sesudah Renovasi Kampung Pelangi

Sumber : Diambil dari Website Wisatalah.com

Dulunya sebelum dilakukan perubahan wilayah Kampung Pelangi merupakan kawasan pemukiman penduduk kumuh bernama Kampung Wonosari, tetapi Pemerintah Kota Semarang mengubah nama Kampung Wonosari menjadi Kampung Pelangi dan merubah kawasan ini menjadi berwarna-warni seperti Pelangi yang tepatnya berada di RW 03 dan RW 04.

Wisata Kampung Pelangi mengalami pembangunan pada tahun 2017 oleh Pemerintah Kota Semarang yaitu Bapak Hendrar Prihadi S.E M.M. Pembangunan ini berlanjut dari pembangunan Pasar Kembang Kalisari yang posisinya di depan Kampung Pelangi. Pada awalnya perbaikan yang dilakukan di lokasi pasar kembang atau pasar bunga diharap dapat menjadi destinasi wisata baru yang dapat menarik lebih banyak wisatawan.



Gambar 1. 2 Pembangunan Wisata Kampung Pelangi

Sumber : Website Semarangkota.go.id

Namun setelah proses renovasi pasar kembang selesai, keindahan yang diharapkan ternyata tidak sesuai dengan harapan karena wilayah perkampungan yaitu Kampung Wonosari yang berada di belakang lokasi ini cukup mengganggu pemandangan dan keindahan pasar. Hal ini membuat Pemerintah Kota Semarang memerintahkan masyarakat Kampung Wonosari untuk mulai merenovasi dan membersihkan tempat tinggal mereka supaya tidak terlihat kumuh.

Melalui implementasi program KOTAKU yang diinginkan agar mampu memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat sekitar. Melalui penerapan kebijakan KOTAKU, kampung ini diubah menjadi kawasan destinasi wisata dan berubah menjadi Kampung Pelangi. Rencana pembangunan di Kampung Pelangi berpedoman pada kebijakan KOTAKU dengan tujuan mengatasi wilayah permukiman yang kumuh supaya bisa bermanfaat dan mensejahterakan masyarakat sekitar, serta bisa meningkatkan jumlah wisatawan di Kampung Pelangi.

Kampung Pelangi telah melalui perubahan menjadi kampung yang penuh cat warna-warni dan didesain khusus oleh seluruh aktor yang terlibat sehingga

menjadikan kampung ini terlihat artistic dan unik. Dengan terlibatnya beberapa aktor dan telah dilakukannya penataan ulang membuat Kampung Pelangi menjadi kampung yang bersih, dilengkapi dengan fasilitas seperti gardu pandang, serta kuliner.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Dinas Penataan Ruang Kota Semarang memiliki peran untuk membantu membuat dan meletakkan fasilitas berupa gardu pandang yang diletakkan di lantai 2 serta dilengkapi meja dan kursi sehingga membuat tempat ini cocok untuk dijadikan spot foto menarik dengan latar belakang bertuliskan Kampung Pelangi yang indah. Selain itu, tempat ini juga menjadi unik karena terdapat Taman Kasmaran yang menambah spot keindahan di lokasi Kampung Pelangi.

Kepala Distrik Kota Semarang, yaitu Bapak Agus Riyanto mengungkapkan bahwa pengaruh dari perbaikan dan pembangunan kembali Kampung Pelangi menjadi besar terutama bagi perekonomian masyarakat. Dengan pengamatan lokasi yang tepat dan berjarak tidak jauh dari Lawang Sewu serta Rumah Sakit Dr Kariadi, membuat lokasi Kampung Pelangi menjadi banyak dikunjungi oleh wisatawan karena sangat strategis karena lokasi Kampung Pelangi ini dekat dengan pusat kota.

Untuk melakukan pengembangan pariwisata dibutuhkan beberapa aktor supaya bisa mendukung perkembangan dan mencapai tujuan yang dicita-citakan. Dalam governance terdapat beragam aktor yang dapat berpengaruh dalam prosesnya, yaitu meliputi pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat (Rosidi & Fajriani, 2013).

Setiap aktor yang terlibat pada proses pengembangan wisata tentu mempunyai tugas dan perannya tersendiri seperti sebagai pembuat kebijakan (*policy creator*), koordinator, fasilitator, pelaksana (*implementor*), dan akselerator (Riant Nugroho, 2014). Dalam proses pengembangan objek wisata Kampung Pelangi terdapat aktor-aktor yang terlibat yaitu meliputi pemerintah, sektor swasta, dan kelompok masyarakat.

Aktor dari sektor pemerintah yang ikut berperan adalah Pemkot Semarang, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, serta Pemerintah Daerah lainnya yang ikut berpartisipasi dalam memperbaiki dan membenahi sungai, taman, kuliner, pedagang bunga, dan menyediakan fasilitas seperti gardu pandang.

Pemerintah juga melaksanakan koordinasi melalui regulasi yang dikeluarkan dalam pengembangan wisata Kampung Pelangi, karena program ini memiliki sifat *top down*, sehingga pemerintah mempunyai kekuasaan penuh untuk menentukan perencanaan dan pelaksanaan program prioritas.

Berdasarkan hal tersebut, keikutsertaan Pemerintah Kota Semarang merupakan langkah penting dalam rangkaian pengembangan destinasi wisata Kampung Pelangi, sehingga diharapkan lokasi wisata ini dapat berkembang dengan lebih baik berkat adanya bantuan dari pemerintah.



Gambar 1. 3 Kerjasama Aktor Swasta Dengan Pemerintah Kota Semarang

Sumber : Website Suaramerdeka.com

Sektor swasta juga memegang peran yang serupa dalam pengembangan sektor pariwisata Kampung Pelangi yaitu dengan pemberian bantuan dan mereka akan menerima *feedback* dari bantuan yang diberikan tersebut berupa promosi. Aktor swasta yang terlibat dalam pengembangan wisata Kampung Pelangi adalah beberapa perusahaan cat seperti PT Mowilex, PT Nippon Paint, PT Propan Raya, dan juga Bank BRI.

Sektor swasta ini ikut mensupport pengembangan pariwisata Kampung Pelangi sejak tahun 2017 melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR) dengan membantu mengecat wilayah Kampung Pelangi yang menjadi tujuan pariwisata. Kemudian pada tahun 2019, PT Mowilex terus memegang komitmen untuk mengembangkan Kampung Pelangi sebagai destinasi wisata yang menarik. Pada bulan November 2019, PT Mowilex bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Kota Semarang dan masyarakat yang tinggal di Kampung Pelangi untuk melakukan pengecatan ulang di kampung tersebut, dan sejumlah 2.500 liter cat merek Mowilex telah disumbangkan kepada Pemerintah Daerah Kota Semarang oleh PT Mowilex.

Selain itu, terdapat komunitas yang terlibat sebagai aktor perwakilan masyarakat yaitu Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis Kampung Pelangi). Pokdarwis ini memiliki peran dalam berkoordinasi dengan seluruh stakeholders yang terlibat seperti pemerintah, akademisi, media massa, dan pihak swasta. Pokdarwis ini dibentuk untuk mempersiapkan warga dalam menyambut wisatawan yang datang.

Koordinasi yang dilakukan Pokdarwis meliputi pengimplementasian program, merumuskan kebijakan, mengembangkan inovasi produk unggulan, dan lainnya. Pembentukan Pokdarwis secara resmi sudah terdapat dalam SK Pokdarwis yang dikeluarkan pemerintah sehingga Pokdarwis memiliki tanggung jawab yang besar terkait keberlangsungan wisata Kampung Pelangi.

Tugas yang dijalankan Pokdarwis seperti dalam mengurus berbagai hal yang bersifat administratif, melakukan pengontrolan terhadap masyarakat supaya tetap tertib dan disiplin, serta membuat berbagai kegiatan yang bersifat positif supaya dapat menarik minat dan perhatian wisatawan.

Mengikuti perkembangan zaman yang semakin canggih dalam melaksanakan program pengembangan wisata tentunya tidak terlepas dari penggunaan promosi melalui media massa baik elektronik ataupun non elektronik. Dalam melakukan pengembangan wisata, Kampung Pelangi juga menggunakan media massa. Akan tetapi, media massa yang digunakan masih belum berkembang dengan baik karena belum ada koordinasi yang terjalin dengan baik antara masyarakat dan pemerintah terkait promosi wisata di Kampung Pelangi.



Gambar 1. 4 Akun Instagram Kampung Pelangi

Sumber : Instagram Kampung Pelangi Semarang

Salah satu media massa yang digunakan untuk mempromosikan objek wisata Kampung Pelangi adalah Instagram dengan nama akun @kampungpelangi_smg. Akun instagram ini digunakan untuk memperkenalkan wisata yang ada di Kampung Pelangi sehingga diharapkan dengan adanya media sosial instagram ini objek wisata Kampung Pelangi bisa lebih dikenal masyarakat luas.



Gambar 1. 5 Postingan Terakhir Instagram Kampung Pelangi

Sumber : Akun Instagram Kampung Pelangi Semarang

Namun pada saat ini akun instagram Kampung Pelangi tidak aktif lagi dalam memberikan pembaharuan informasi terbaru sehingga hal ini membuat

promosi yang dijalankan menjadi kurang berjalan baik. Dapat dilihat pada postingan terakhir di akun Instagram tersebut yang mengupload pada foto pada 18 Januari 2019. Sehingga dengan ini menyatakan bahwa media massa yang digunakan masih belum berkembang dengan baik dalam melakukan promosi mengenai destinasi wisata, informasi bagi pengunjung, serta produk unggulan yang dimiliki oleh Kampung Pelangi.

Kemudian sejak masa pandemi Covid-19 jumlah wisatawan yang datang berkunjung mengalami penurunan sehingga membuat lokasi wisata Kampung Pelangi menjadi kurang terurus. Hal ini terbukti dari struktur bangunan objek wisata yaitu cat yang memudar bahkan banyak bangunan cat yang sudah dirusak karena dicorat-coret oleh anak-anak kecil.



Gambar 1. 6 Cat Yang Memudar Dan Rumah Warga Yang Hampir Rubuh

Sumber : Diambil langsung di lokasi penelitian

Selain itu, terdapat banyak rumput liar yang merambat di sekitar jalanan dan di sekitar rumah warga, terdapat rumah warga yang hampir rubuh sehingga dapat mengganggu kenyamanan wisatawan, serta kebersihan lingkungan yang kurang diperhatikan dengan baik karena terdapat banyak kotoran burung.

Berdasarkan sisi fasilitas penunjang pelayanan wisata yaitu seperti pintu masuk yang berubah fungsi menjadi lahan parkir bagi warga dan penjual bunga di sekitar lokasi, gardu pandang yang berubah fungsi menjadi tempat bersarangnya burung merpati. Kemudian belum adanya fasilitas akomodasi yang layak bagi para wisatawan yang datang berkunjung, jalanan yang masih harus dilakukan perbaikan supaya tidak terlalu curam agar masyarakat serta para wisatawan tetap bisa menikmati perjalanan saat mengunjungi Kampung Pelangi.

Selain itu, toilet umum harus ditambahkan dan perlu dijaga kebersihannya, perlu adanya tiang penunjuk arah yang tepat di setiap sisinya supaya dapat memudahkan wisatawan, serta harus meningkatkan kualitas pemukiman penduduk supaya dapat menjadi faktor pendukung promosi wisata.

Berdasarkan sisi aksesibilitas transportasi masih belum memiliki lahan parkir yang luas dan memadai. Selain itu, kurangnya partisipasi aktif dan inisiatif dari warga masyarakat untuk membantu mengembangkan pariwisata Kampung Pelangi juga menjadi penyebab kurang berkembangnya objek wisata Kampung Pelangi. Hal ini disebabkan karena mereka menganggap yang berhak untuk melanjutkan pengembangan wisata hanya pemerintah daerah saja.

Berdasarkan hal tersebut membuat kualitas warga masyarakat menjadi rendah karena tidak dibekali dengan kemampuan dan keahlian khusus mereka sendiri. Berbagai permasalahan yang ada diatas menunjukkan bahwa perawatan dan pelestarian objek wisata Kampung Pelangi kurang diperhatikan dengan baik oleh warga sekitar dan pemerintah.

Dengan adanya beberapa permasalahan pada objek wisata Kampung Pelangi ini, membuat teori peran aktor menjadi instrumen penting untuk dilakukan analisis supaya bisa mengetahui kaitan atau hubungan antar pihak-pihak yang terkait, serta peran-peran penting yang harus dilaksanakannya terutama pada penelitian ini yang membahas tentang pengembangan wisata Kampung Pelangi di Kota Semarang.

Oleh karena itu, adanya penelitian ini diharap bisa menganalisis peran aktor-aktor yang terlibat dalam pengembangan wisata Kampung Pelangi, serta dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pengembangan wisata Kampung Pelangi di Kota Semarang. Dengan demikian, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Peran Aktor Dalam Pengembangan Wisata Kampung Pelangi Di Kelurahan Randusari, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang”**.

1.2 Identifikasi Masalah

1. Kurangnya partisipasi dan inisiatif aktif dari masyarakat yang tinggal di wilayah Kampung Pelangi, Kota Semarang.
2. Kapasitas dan kompetitas Sumber Daya Masyarakat yang masih terbatas di wisata Kampung Pelangi, Kota Semarang.
3. Komitmen sektor swasta tidak berjalan baik dalam pengembangan wisata Kampung Pelangi, Kota Semarang.
4. Kurangnya perhatian dan rasa kepedulian dari sektor Pemerintah terhadap kondisi terkini objek wisata Kampung Pelangi, Kota Semarang.

1.3 Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran aktor dalam pengembangan wisata Kampung Pelangi di Kelurahan Randusari, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang?
2. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat peran aktor dalam pengembangan wisata Kampung Pelangi di Kelurahan Randusari, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis peran aktor dalam pengembangan wisata Kampung Pelangi di Kelurahan Randusari, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang.
2. Menganalisis faktor pendukung dan faktor penghambat peran aktor dalam pengembangan wisata Kampung Pelangi di Kelurahan Randusari, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang.

1.5 Kegunaan Dan Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Diharapkan bahwa melalui penelitian ini dapat bermanfaat dalam mengembangkan ilmu pengetahuan secara umum maupun khusus yang berkaitan dengan Kebijakan Publik serta Peran Aktor dalam pengembangan objek wisata terutama di Kampung Pelangi Kota Semarang.

1.5.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat meluaskan cakrawala pengetahuan dan pemikiran yang diperoleh dari lapangan, yang kemudian dapat

diimplementasikan dalam kehidupan dan lingkungan sekitar. Selain itu, bisa menjadi sumber referensi bagi penelitian berikutnya dalam memperdalam penelitian yang memiliki tema serupa.

2. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi arahan yang berharga kepada Pemerintah Kota Semarang dalam upaya pengelolaan dan peningkatan destinasi pariwisata Kampung Pelangi di Kelurahan Randusari, Kota Semarang, sehingga diharapkan dapat memberi tambahan informasi bagi Pemerintah Kota Semarang supaya pengembangan wisata bisa berkembang secara optimal dan dapat mencapai keberhasilan.

3. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan pemahaman dan juga informasi bagi masyarakat supaya bisa lebih memahami bagaimana karakteristik wilayah tempat tinggal mereka yang masuk dalam Program Kampung Tematik. Selain itu, Diharapkan agar masyarakat setempat dapat terlibat secara aktif dalam pengembangan objek wisata Kampung Pelangi.

1.6 Kajian Teori

1.6.1 Penelitian Terdahulu

Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu

No	Penulis, Tahun	Tujuan Penelitian	Landasan Teori	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Kusnul Rohmania, et al (2022) Analisis Peran Aktor Penta Helix Dalam Pengembangan Wisata Taman Anggrek Sememi Ex Lokalisasi Moroseneng Kota Surabaya Journal Of Gender Equality And Social Inclusion (Gesi)	Untuk mengevaluasi peran aktor dalam kerangka pentahelix dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung atau menghambatnya.	Rosardi, Raras Gistha (2020). Model Pentahelix dalam mendorong pariwisata berkelanjutan, meliputi : - Akademisi (<i>Academic</i>), - Bisnis (<i>Business</i>), - Masyarakat (<i>Community</i>), - Pemerintah (<i>Government</i>), - Media.	Menggunakan metode kualitatif deskriptif.	Menurut analisis tersebut, peran aktor dalam kerangka Pentahelix dalam pengembangan Taman Anggrek belum mencapai tingkat optimal karena beberapa alasan. Oleh karena itu, diperlukan peran aktor yang akan bertanggung jawab untuk melakukan analisis lebih lanjut terhadap pengembangan Taman Anggrek di ekslokalisasi Sememi, Kota Surabaya.
2.	Shendy Yasmin Arafat, et al (2022) Analisis Peran Aktor Dalam Pengembangan Obyek Wisata Umbul Susuhan Di Desa Manjungan Kecamatan Ngawen Kabupaten Klaten. Journal Of Public Policy And Management Review	Untuk mengidentifikasi dan menganalisis aktor yang terlibat beserta peran aktor tersebut.	Maryono dalam Handayani (2017). Aktor/stakeholders dikelompokkan menjadi : - Stakeholder primer, - Stakeholder kunci, - Stakeholder sekunder. Nugroho, 2014 (dalam Handayani, 2017). Peran Stakeholder, meliputi : - Pembuat Kebijakan (Policy Creator), - Koordinator (Koordinator), - Fasilitator (Fasilitator), - Pelaksana (Implementor), - Pendukung Cepat (Akselerator).	Metode deskriptif kualitatif	Hasil penelitian ini yaitu : Identifikasi aktor yang terlibat adalah sebagai berikut stakeholder utama, stakeholders kunci, dan stakeholders sekunder. Namun, ada beberapa kendala yang dihadapi oleh beberapa pihak dalam menjalankan peran mereka sebagai akibat dari pandemi Covid-19.
3.	Achmad Nur Fauzi, et al (2018) Analisis Peran Aktor Dalam Formulasi Kebijakan Semarang Smart City	Untuk menggambarkan peran dan interaksi antara para aktor dalam proses penyusunan kebijakan untuk pengembangan Semarang Smart City.	Moore (dalam Anggara, 2014: 187). Aktor perumusan kebijakan, meliputi : - aktor dari pihak pemerintah (state), - aktor dari sektor swasta (private),	Menerapkan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif	Dalam hasil penelitian, terdapat partisipasi sebanyak 28 aktor dalam proses tersebut, yaitu unsur pemerintah (negara) yang diwakili oleh 24 aktor, sektor swasta yang diwakili oleh 4 aktor, sedangkan tidak ada partisipasi dari aktor masyarakat. Masing-

No	Penulis, Tahun	Tujuan Penelitian	Landasan Teori	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
	Journal of Public Policy and Management Review		- aktor dari masyarakat sipil (civil society).		masing dari ketiga kategori ini memegang peran yang berbeda, dan menciptakan hubungan yang kompleks antara mereka dalam proses formulasi kebijakan. Hubungan ini memiliki dampak pada distribusi kekuasaan dan kepentingan di antara mereka serta mencerminkan nilai-nilai yang dipegang oleh setiap kelompok aktor dalam proses perumusan kebijakan.
4.	Debby Fifiyanti et al (2021) Pemetaan Peran Dan Kontribusi Pemangku Kepentingan Dalam Pengembangan Ekowisata Desa Burai. Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora	Untuk mengenali dan mengkategorikan aspek terpenting dalam pengembangan ekowisata.	Sekhri (2009). Peran stakeholders dalam pengembangan ekowisata, yaitu: - Regulator, - Fasilitator, - Pelaksana.	Menggunakan metode kualitatif.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebutuhan pelaku dikategorikan ke dalam tiga kategori fasilitator, regulator, dan pemasok atau vendor. Akibatnya, persepsi kebutuhan dan keinginan pelaku disesuaikan dengan prioritas dan tujuan yang telah ditetapkan.
5.	Rahmawati Ahfan (2022) Kolaborasi Antar Aktor Dalam Inovasi Desa Sebagai Salah Satu Pengembangan Masyarakat Islam (Studi Komparasi Desa Hanura Kecamatan Padang Cermin Dan Desa Tarahan Kecamatan Katibung Di Kabupaten Pesawaran) Jurnal Ilmu Manajemen Saburai	Untuk menganalisis suatu model pengembangan masyarakat islam melalui kolaborasi inovasi aktor di dalamnya.	Yunas (2019) Kolaborasi aktor, yaitu : - Pemerintah kabupaten, - Pemerintah desa, - Organisasi masyarakat sipil, - Sektor swasta, dan - masyarakat.	Menggunakan metode penelitian kualitatif dan kuantitatif.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Desa Hanura lebih banyak menggunakan kerja tim dan leadership kolaborasi, sedangkan Desa Tarahan melakukan inovasi yang lebih bergantung pada kolaborasi kultur. Desa Hanura adalah desa transmigrasi yang lebih kecil, jadi lebih mudah untuk membawa perubahan dan membangun masyarakat yang lebih hidup dan harmonis.
6.	Itah Masitah (2019) Pengembangan Desa Wisata Oleh Pemerintah Desa Babakan Kecamatan	Untuk memahami peran Pemerintah Desa dalam mengembangkan desa wisata melalui upaya memotivasi partisipasi	Fandeli (2012:171). Teori desa wisata mencakup berbagai topik, antara lain sosial budaya, adat istiadat, aktivitas sehari-hari, arsitektur bangunan, dan	Metode kualitatif deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Desa Babakan tidak melakukan pekerjaan yang baik dalam membangun desa dan tidak melibatkan masyarakat dalam rencana dan pembangunan desa.

No	Penulis, Tahun	Tujuan Penelitian	Landasan Teori	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
	Pangandaran Kabupaten Pangandaran. Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara	masyarakat dalam aktivitas pariwisata.	penataan ruang desa, serta potensinya sebagai destinasi wisata. Hadiwijoyo (2012, 57) menyatakan Teori Pembangunan Desa Wisata mencakup semua kegiatan dan upaya untuk menarik wisatawan melalui dukungan wisata yang bertujuan untuk menentukan kebutuhan wisatawan.		Akibatnya, keberadaan desa tidak meningkatkan kualitas hidup.
7.	Riska Destiana, et al Kismartini, Tri Yuningsih (2020) Analisis Peran Stakeholders Dalam Pengembangan Destinasi Pariwisata Halal Di Pulau Penyengat Provinsi Kepulauan Riau Jurnal Ilmu Administrasi Negara (Asian)	Untuk menentukan pihak-pihak yang terlibat menganalisis fungsi, menganalisis hubungan satu sama lain, dan menganalisis faktor-faktor yang mendukung dan menghambat.	Yuniningsih (2018). Model pentahelix dalam pengembangan pariwisata, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> - Akademisi, - Bisnis, - Community, - Government - Media Massa. 	Menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.	Berdasarkan penelitian pengembangan halal pariwisata Pulau Penyengat jelas melibatkan pemangku kepentingan berkonsep pentahelix, antara lain akademisi, dunia usaha, komunitas, pemerintah, dan media. Terdapat 38 pemangku kepentingan yang telah teridentifikasi dan diklasifikasikan menjadi pemangku kepentingan primer, kunci, dan sekunder. Pemangku kepentingan dibagi menjadi lima kategori: pencetus kebijakan, koordinator, fasilitator, pelaksana, dan akselerator. Hubungan antar pemangku kepentingan dapat dilihat melalui bentuk dan kegiatannya.
8.	Saekul Anwar et al (2022) Kebijakan Pengembangan Pariwisata Di Kabupaten Bandung: Kajian Pada Kampung Gamis–Soreang. Jurnal Ilmu Administrasi	Untuk menganalisis perkembangan dan mengkaji hubungan sosiomaterial yang mendasari proses pengembangan destinasi pariwisata.	Freeman (2010) Pemangku kepentingan adalah kelompok atau individu yang dapat dipengaruhi atau dipengaruhi oleh terpenuhinya tujuan organisasi. <p>Teori ANT (Actor Network Theory), alam semesta terdiri dari hubungan-hubungan padat yang terus menerus terbentuk yang tidak dapat dicirikan sebagai hubungan sosial, alam, teknologi, atau budaya saja, melainkan dalam bentuk hibrida (Van</p>	Menggunakan metode kualitatif	Penelitian tersebut menyoroti empat aktor penting yang ikut serta dalam pengembangan atraksi wisata di Kampung Gamis: pemerintah Kabupaten Bandung, asosiasi atau komunitas pariwisata setempat, pengusaha industri fesyen atau gamis, dan warga Desa Kramat Mulya. Minimnya pengalaman pelaku usaha di Destinasi Wisata Kampung Gamis menjadi salah satu penghambat pengembangannya.

No	Penulis, Tahun	Tujuan Penelitian	Landasan Teori	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
			der Duim, 2007; van der Duim dkk., 2017).		
9.	Ira Indawati, et al (2021) Analisis Kegagalan Pembangunan Desa Wisata Kungkuk (Studi Kasus di Desa Punten Kota Batu). Publik (Jurnal Ilmu Adminsitrasi)	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kegagalan pembangunan.	Teori pengembangan desa wisata dapat membangun persaingan ekonomi, persaingan tidak hanya dalam lapangan kerja tetapi juga dalam permodalan (Husni & Safaat, 2019).	Menggunakan metode kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegagalan berkembangnya Desa Wisata Desa Kungkuk disebabkan oleh kurangnya dukungan pemerintah desa dan belum adanya peraturan desa yang melindungi Desa Wisata.
10.	Zaleha Mohammad et al (2019) Peran berbagai pemangku kepentingan terhadap pariwisata berkelanjutan di lahan basah Setiu Opción: Revista de Ciencias Humanas y Sociales	Untuk mengkaji bagaimana pemangku kepentingan menjalankan tugasnya dalam menciptakan destinasi wisata yang menganut konsep berkelanjutan.	Sautter dan Leisun (1999) menggambarkan pemangku kepentingan dalam konteks pariwisata sebagai kelompok atau individu yang memiliki kepentingan sah dalam operasional destinasi, sehingga memberikan mereka kemampuan untuk mempengaruhi kinerja destinasi atau kepentingan di dalamnya. Penggugat yang juga merupakan pemberi pengaruh, atau bahkan keduanya sekaligus (Kaler, 2002; Weaver, 2006).	Menggunakan metode kualitatif	Temuan ini menunjukkan bahwa setiap pemangku kepentingan mempunyai strategi yang tepat untuk mencapai pariwisata berkelanjutan. Terakhir, setiap pemangku kepentingan harus melakukan apa yang diminta dari mereka dan mengikuti pedoman yang diberikan oleh pemerintah untuk memastikan semua operasi berjalan lancar.

Sumber : Data diolah dari berbagai sumber oleh peneliti

Berdasarkan sumber penelitian yang sudah dilakukan penelitian oleh penulis, dapat dilihat bahwa hampir semua penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif supaya dapat menjelaskan terkait fenomena yang ada dilapangan. Pada penelitian pertama dilakukan oleh Kusnul dan Sri yang memiliki tujuan untuk menganalisis peran aktor pentahelix serta faktor pendukung dan penghambatnya. Lokasi penelitian dilakukan Taman Anggrek Sememi Ex Lokalisasi Moroseneng, Kota Surabaya. Dalam penelitian ini, terlihat bahwa peran aktor belum berjalan optimal dalam melakukan pengembangan wisata taman anggrek. Selain itu, terdapat faktor penghambat dan faktor pendorong dalam pengembangan wisata taman anggrek. Oleh karena itu, Kusnul dan Sri menyarankan supaya dibentuk peran aktor yang bertugas untuk menganalisis pengembangan wisata taman anggrek di ekslokalisasi Sememi Kota Surabaya.

Penelitian kedua dilakukan oleh Shendy, dkk yang dilakukan di Obyek Wisata Umbul Susuhan Desa Manjungan, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis aktor beserta peran dari masing-masing aktor yang terlibat. Pada penelitian ini stakeholders yang ikut berkontribusi meliputi Stakeholder Primer, Kunci, dan Sekunder dengan beragam perannya seperti Policy Creator, Koordinator, Implementator, Fasilitator dan Akselerator. Namun dalam menjalankan peran tersebut terdapat beberapa aktor yang mendapatkan permasalahan karena pandemi Covid-19.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Achmad Nur Fauzi, et al yang bertujuan untuk menggambarkan peran dan interaksi antara para aktor dalam proses

perumusan kebijakan Semarang Smart City. Terdapat partisipasi sebanyak 28 aktor, yaitu meliputi unsur pemerintah (negara) yang diwakili oleh 24 aktor, sektor swasta oleh 4 aktor, serta tidak ada partisipasi dari aktor masyarakat. Masing-masing aktor ini memegang peran yang berbeda dan menciptakan hubungan yang kompleks antara mereka dalam proses formulasi kebijakan. Sehingga hubungan ini memiliki dampak pada distribusi kekuasaan dan kepentingan di antara mereka serta mencerminkan nilai-nilai yang dipegang oleh setiap aktor dalam proses perumusan kebijakan. Karena itu, strategi kolaboratif antara aktor kebijakan perlu diimplementasikan secara efektif.

Penelitian keempat dilakukan oleh Debby dan Janianton dengan tujuan untuk menemukan dan membedakan fungsi dan dampak pemangku kepentingan terhadap pengembangan ekowisata di Desa Burai. Dalam penelitian ini terdapat 13 pemangku kepentingan yang memiliki peran yang berbeda dan diidentifikasi dalam tiga kelompok, meliputi pengendali, fasilitator, dan pengelola atau pelaksana. Dengan adanya perbedaan peran dan kepentingan ini membuat para aktor dapat berjalan dinamis sesuai dengan komitmen pada tujuan dan prioritas yang telah ditetapkan.

Penelitian kelima dilakukan oleh Rahmawati yang dilakukan dengan tujuan untuk mempelajari model pengembangan masyarakat Islam melalui kolaborasi antar aktor dalam inovasi desa di Desa Hanura Kecamatan Padang Cermin dan Desa Tarahan Kecamatan Katibung Kabupaten Pesawaran. Dalam penelitian ini, mereka yang termasuk aparat desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan aktivis sosial kemasyarakatan adalah semua orang yang berkontribusi pada perubahan desa yang

saling berkolaborasi secara kepemimpinan, kolaborasi dalam proses tim, dan kolaborasi kultur. Kemudian Inovasi desa yang sudah dilakukan meliputi inovasi dalam proses, strategi, produk, dan layanan.

Penelitian keenam dilakukan oleh Itah untuk mempelajari bagaimana pemerintah desa membantu mengembangkan desa wisata dengan mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan pariwisata di Desa Babakan, Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran. Penelitian ini menunjukkan bahwa pengembangan desa wisata kurang dilaksanakan dengan baik, serta pemerintah desa juga kurang melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengembangan sehingga desa wisata di Desa Babakan belum memberikan dampak yang signifikan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, pengembangan desa wisata menghadapi kendala seperti kekurangan dana dan dukungan masyarakat, yang menghalangi pengembangan desa wisata untuk mencapai potensi terbaiknya.

Penelitian ketujuh dilakukan oleh Riska, dkk yang bermaksud untuk mengidentifikasi aktor-aktor yang terlibat, menganalisis peran mereka, meneliti interaksi di antara mereka, dan meneliti faktor-faktor yang mendukung dan menghalangi pembangunan destinasi pariwisata halal di Pulau Penyengat, Provinsi Kepulauan Riau. Studi ini melibatkan 38 pihak yang terlibat dalam konsep pentahelix, termasuk di dalamnya adalah para akademisi, pelaku bisnis, komunitas, pemerintah, dan media massa. Mereka kemudian dikategorikan sebagai stakeholders utama, kunci, dan pendukung yang memiliki peran sebagai pembuat kebijakan, koordinator, fasilitator, pelaksana, dan pengakselerasi. Terdapat faktor

pendukungnya yaitu nilai dan komunikasi, sedangkan yang menjadi faktor penghambatnya yaitu kebijakan dan kepercayaan.

Penelitian kedelapan dilakukan oleh Saekul, dkk yang memiliki tujuan untuk menganalisis perkembangan dan mempelajari hubungan sosiomaterial yang mendasari proses pengembangan destinasi wisata Kampung Gamis Soreang Di Kabupaten Bandung. Dalam penelitian ini terdapat empat aktor yang terlibat yaitu Pemerintah Kabupaten Bandung, asosiasi atau komunitas pariwisata lokal, pengusaha industri fashion atau gamis, dan masyarakat Desa Kramat Mulya. Kemudian terdapat kendala yang menghambat proses pengembangan destinasi wisata meliputi pengalaman pelaku usaha yang masih minim, keadaan sosial dan ekonomi masyarakat masih buruk, dan penjualan yang masih minim serta tidak merata karena adanya desakan dari pasar luar daerah untuk meminta permintaan prioritas produksi.

Penelitian kesembilan dilakukan oleh Ira, dkk yang mempunyai tujuan untuk mengevaluasi kegagalan proyek Desa Wisata Kungkuk di Desa Punten Kota Batu. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat kegagalan dalam pengembangan Desa Wisata Kungkuk yang disebabkan oleh kurangnya dukungan dari pemerintah desa dan tidak ada peraturan desa yang menjadi payung hukum dalam proses pengembangan Desa Wisata.

Penelitian kesepuluh yang dilaksanakan oleh tim peneliti yang dipimpin oleh Zaleha Mohammad bertujuan untuk menyelidiki bagaimana pemangku kepentingan melaksanakan tugas mereka dalam pengembangan destinasi wisata dengan fokus pada konsep keberlanjutan di Lahan Basah Setiu. Penelitian ini mengungkapkan bahwa seluruh pemangku kepentingan berperan dengan efektif dalam mewujudkan pariwisata yang

berkelanjutan. Dalam kesimpulannya, ditegaskan bahwa setiap pihak yang diharapkan aktif dalam menjalankan fungsi mereka dan memberikan dukungan terhadap kebijakan yang telah disusun oleh Pemerintah, untuk memastikan bahwa semua perencanaan berjalan sesuai rencana

1.6.2 Administrasi Publik

Chandler dan Plano (dalam Keban, 2008:4) mengungkapkan administrasi publik adalah kegiatan pengelolaan dan koordinasi sumber daya dan personel publik dengan tujuan supaya bisa membuat, menjalankan, dan mengawasi pengambilan keputusan kebijakan publik. Selanjutnya, menurut Keban (2014: 4), Istilah "administrasi publik" merujuk pada peran pemerintah sebagai regulator yang aktif dan proaktif dalam memberikan arahan atau tindakan yang dianggap baik dan penting bagi masyarakat. Dalam konteks ini, masyarakat dianggap sebagai pihak yang pasif dan kurang mampu, sehingga harus patuh dan menerima segala arahan yang diberikan oleh pemerintah.

Berlandaskan definisi administrasi publik tersebut bisa diambil kesimpulan administrasi publik merupakan serangkaian kegiatan dalam menyelenggarakan bersama-sama oleh aparatur negara atau pemerintahan yang bertugas untuk mengatur, mengelola, memformulasi, mengimplementasi, mengkoordinasi, ataupun menjalankan kekuasaan dalam rangka mencapai tujuan negara, upaya yang dilakukan harus efisien dan efektif.

1.6.3 Paradigma Administrasi Publik

Menurut Nicholas Henry yang dikutip oleh Keban (2014: 31) merumuskan lima paradigma dalam administrasi publik yang didasari oleh fokus kepentingan dan lokus secara institusional, yaitu meliputi :

1. Paradigma Dikotomi Politik dan Administrasi (1900-1926). Permasalahan dalam paradigma ini yaitu terkait posisi sebenarnya administrasi negara, dengan memisahkan urusan dalam politik dan administrasi dalam fungsi pemerintahan. Urusan dalam politik yaitu terkait masalah politik, pemerintahan dan kebijakan, sedangkan urusan dalam administrasi yaitu terkait masalah dalam organisasi, pegawai dan menyusun anggaran dalam pemerintahan. Paradigma ini dianut oleh beberapa ahli yang berpendapat bahwa birokrasi pemerintah harus menjadi pusat administrasi negara. Tetapi hal ini menyebabkan permasalahan antara akademisi dan praktisi terkait paradigma ini. Oleh karena itu, administrasi negara termasuk dalam domain ilmu politik.
2. Paradigma Prinsip-Prinsip Administrasi (1927-1937). Paradigma ini mengutamakan hal pentingnya pada fokus, sedangkan pada lokusnya tidak diutamakan. Paradigma ini menganggap bahwa administrasi publik mempunyai sifat yang universal, sehingga bisa dilaksanakan oleh seluruh bagian pada administrasi yang tidak mementingkan budaya, fungsi, misi, keadaan, atau bagian dalam institusi. Prinsip yang dijadikan sebagai bagian terpenting dalam administrasi adalah sebagai salah satu ilmu. Tokoh dalam

paradigma ini yaitu Mary Parker Follet, Henry Fayol, Frederick W. Taylor yang mengungkapkan *Principle of Scientific Management*, Max Weber lebih fokus kepada pengaruh pada manajemen kepada administrasi negara.

3. Paradigma Administrasi Publik sebagai Ilmu Politik (1950-1970). Dengan eksistensi administrasi publik yang kembali lagi kepada ilmu politik. Hal ini karena administrasi publik didasarkan dengan pengabdian terhadap kewenangan dan kekuasaannya untuk membantu menguasai pemerintahan dengan lebih efisien. Lokus dalam administrasi publik sudah terlihat dengan jelas, yaitu mengenai lingkungan birokrasi pemerintah. Pada paradigma ini administrasi mengalami krisis identitas karena ilmu politik dijadikan sebagai disiplin ilmu yang mendominasi dalam administrasi publik. Tokoh dalam paradigma ini, yaitu Chester Barnard, Herbert Simon, Allen Schick, Frederick Mosher, Robert Dahl, dan Dwight Waldo.
4. Paradigma Administrasi Publik sebagai Ilmu Administrasi Publik (1956-1970). Paradigma ini lebih mementingkan fokus dibandingkan dengan lokusnya karena bukan bagian dari syarat yang ditetapkan. Teknik dalam ilmu manajemen dan teori pada organisasi dikembangkan dalam ilmu administrasi publik dengan keahlian dan spesialisasi khusus. Namun posisi dan instansi menjadi teknik yang perlu ditetapkan, tetapi tidak menjadi perumusan perhatian dalam paradigma ini. Dalam paradigma ini terdapat dua jenis administrasi negara, yaitu perkembangan ilmu administrasi murni berdasarkan pengaruh sosial dan ilmu administrasi berdasarkan *Public*

policy. Tokoh dalam paradigma ini, yaitu Keith Henderson, James March, dan Herbert Simon.

5. Paradigma Administrasi Publik sebagai Administrasi Publik/Negara (1970-sekarang). Paradigma ini adalah perbaikan dari paradigma sebelumnya, dimana lokusnya bukan hanya sekedar dalam ilmu murni atau bidang administrasi terkait masalah dan kepentingan publik, namun sudah berkembang dalam teori organisasi dan fokusnya juga ikut mengalami perkembangan dengan lebih memfokuskan bagaimana perkembangan dalam suatu organisasi, ilmu kebijakan (*policy science*), aktor yang terlibat, dan keputusan mengenai kebijakan yang diambil. Sehingga paradigma ini berorientasi terhadap teori dan teknik dalam administrasi, manajemen yang modern, ekonomi politik, proses perumusan, analisis, serta mengukur hasil dalam kebijakan publik. Paradigma ini juga berbeda dengan beberapa paradigma sebelumnya karena dalam paradigma ini memiliki lokus dan fokus yang jelas.
6. Paradigma keenam (1990-sekarang) adalah paradigma baru yang didasari oleh proses perkembangan dalam ilmu administrasi publik yaitu *Governance*. Dimana susunannya terdiri dari kumpulan paradigma yang sudah ada sebelumnya. Namun pada paradigma ini memiliki perbedaan dengan paradigma sebelumnya yaitu terdapat penerapan *government* yang dilaksanakan oleh pemerintah. Melalui perubahan dari yang awalnya *government* menjadi *Governance* ini merubah beberapa unsur yaitu seperti

persatuan antara stabilitas dalam pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Sehingga membuat perkembangan dalam paradigma ini berubah menjadi pemerintahan yang baik.

Berdasarkan keenam paradigma administrasi publik di atas, penelitian mengenai peran aktor dalam pengembangan wisata masuk ke dalam paradigma keenam yaitu paradigma *governance*. Sebab hal ini disesuaikan dengan konsep penyelenggaraan *good governance* dimana dalam pelaksanaannya melibatkan seluruh elemen dalam masyarakat dan dapat diwujudkan jika pemerintah dekat dengan apa yang diperintahkan sehingga dapat menunjukkan adanya desentralisasi dan otonomi.

Elemen yang ada pada kebijakan publik salah satunya adalah terkait aktor yang terlibat. Oleh karena itu, penelitian tentang peran aktor dalam implementasi kebijakan saat ini tidak lagi berpusat hanya pada pemerintah namun harus melibatkan aktor lainnya seperti masyarakat, pihak swasta, atau lain sebagainya yang relevan dengan paradigma keenam ini yaitu paradigma *governance*.

1.6.4 Kebijakan Publik

Konsep Robert Eyestone (1971;18) mengenai kebijakan publik merupakan hubungan salah satu unit pemerintah dengan lingkungannya. Konsep ini bisa dipahami dengan luas tetapi tidak pasti, karena kebijakan publik disini memiliki makna yang sangat banyak dalam berbagai hal. Kemudian Thomas R. Dye (1975;1) menyampaikan pandangannya mengenai kebijakan publik merupakan segala sesuatu yang dipilih pemerintah dalam menjalankan atau tidak menjalankan suatu

hal (*Public policy is whatever the government decides to do or not do*). Meskipun batas yang diberi lumayan tepat, tetapi batasannya kurang membedakan secara jelas mengenai apa yang sudah diputuskan pemerintah dengan apa yang sebenarnya dijalankan oleh pemerintah.

Sedangkan menurut pakar ilmu politik yaitu Carl Friedrich yang mengungkapkan bahwa kebijakan merupakan salah satu petunjuk dalam bertindak melalui usulan orang, kelompok, atau pemerintah pada lingkup tertentu. Kendala serta dukungan kebijakan berdasarkan usulan dalam menjalankan serta mengatasi sesuatu untuk mencapai tujuannya atau implementasi sasaran atau tujuan tertentu (Budi Winarno, 2002:16).

1.6.5 Governance

Konsep *governance* berasal dari konsep terdahulu yaitu *government*. Istilah *government* diterapkan dalam sebuah entitas atau badan yang menjalankan fungsi pemerintahan dalam suatu negara. Konsep *government* merupakan konsep lama, dimana dalam pelaksanaannya pemerintah hanya mengutamakan lembaga atau institusi pemerintahan saja sebagai pihak yang mengatur dan melaksanakan sistem pemerintahannya. Kemudian muncul suatu konsep yaitu *governance* sebagai pengganti konsep pemerintahan yang lama atau *government* pada seluruh aspek pemerintahan.

Konsep *Governance* pada saat ini dapat dipahami sebagai suatu cara oleh pemerintah untuk mengelola seluruh urusan-urusan publik. Menurut World Bank (1997) *governance* didefinisikan “*the way state power is used in managing*

economic and social resources for development of society". Sedangkan menurut *United Nation Development Program (UNDP) (1997) Governance* (kepemerintahan) adalah "*the exercise of political, economic and administrative authority to manage a nation's affair at all levels*".

Berdasarkan defisini tersebut, World Bank berkonsentrasi pada upaya pemerintah dalam mengelola sumber daya sosial dan ekonomi untuk memajukan pembangunan masyarakat, sementara UNDP berkonsentrasi terhadap cara pengelolaan keuangan negara dilakukan secara politik, ekonomi, dan administratif.

Stoker (1998) mengemukakan bahwa *governance* merupakan transformasi dari pola pemerintahan yang menyatukan perbedaan antara publik dan swasta. Inti dari *governance* adalah mekanisme yang tidak tergantung pada wewenang dan sanksi pemerintah. Namun, *governance* telah berkembang menjadi peraturan baru yang mengarah pada *New Public Management (NPM)*. Sehingga dengan demikian, konsep *governance* merupakan instrumen manajemen yang pakai untuk memperbaiki atau meningkatkan sistem *good governance*.

World Bank (1992) menyatakan manajemen pembangunan yang efektif dan beretika, berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, efisiensi, mampu mencegah kesalahan alokasi investasi, dan penanggulangan korupsi baik di tingkat politik maupun administratif dapat didefinisikan sebagai *good governance*. Hal ini juga mencakup disiplin dalam pengelolaan anggaran dan pembentukan kerangka kerja hukum dan politik yang mendukung pertumbuhan aktivitas ekonomi sehingga mampu menciptakan sistem pemerintahan yang baik (*good governance*).

1.6.6 Identifikasi Aktor

Identifikasi aktor menjadi hal utama yang perlu dilaksanakan untuk mengkaji peran para pelaku yang terlibat dalam pengembangan sektor wisata Kampung Pelangi di Kota Semarang. Melalui identifikasi aktor bisa diketahui secara terstruktur terkait siapa saja aktor dalam mengembangkan wisata Kampung Pelangi. Menurut Maryono et al. (2005) (dalam Yosevita : 25) berdasarkan posisi dan pengaruh dalam proses pengambilan keputusan maka aktor di identifikasikan dalam beberapa kelompok, meliputi :

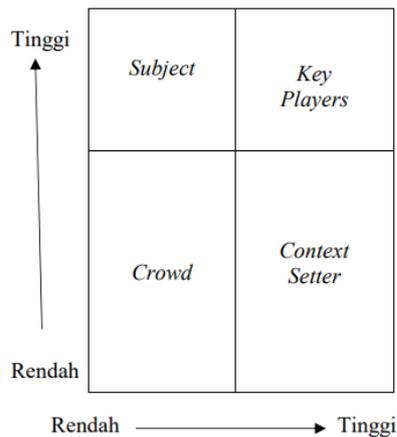
1. Aktor primer adalah individu yang secara langsung merasakan dampak baik atau buruk dari suatu situasi pada suatu kebijakan dan juga mempunyai pengaruh serta kepentingan yang besar karena harus terlibat penuh pada proses menentukan kebijakan pengembangan pariwisata. Aktor primer yang terlibat misalnya yaitu pemilik saham, investor, karyawan, konsumen, penyedia, serta masyarakat dan tokoh penting di dalam Masyarakat.
2. Aktor kunci merupakan orang yang mempunyai wewenang legal pada proses pengambilan kebijakan serta menjadi pihak yang mempunyai andil dan tanggung jawab pada proses pengembangan pariwisata. Aktor kunci yang terlibat merupakan elemen eksekutif yang sesuai dengan tingkat hierarkinya, seperti lembaga legislative, eksekutif, yudikatif, dan beberapa elemen pendukung lainnya. Sebagai contoh, pihak-pihak yang memiliki peran sebagai aktor kunci dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan di tingkat kabupaten melibatkan beberapa elemen seperti Pemerintah Daerah Kabupaten,

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan Dinas yang secara langsung mengawasi kebijakan yang relevan.

3. Aktor sekunder atau pendukung adalah mereka yang tidak terlibat secara langsung dalam rencana yang akan dilaksanakan, namun mempunyai kepedulian besar pada proses pengembangan kebijakan. Aktor sekunder memiliki peran pendukung sebagai pihak yang memfasilitasi dalam proses pengembangan dan memiliki pengaruh besar dalam pengambilan keputusan. Contoh Aktor sekunder yaitu meliputi Lembaga pemerintah di wilayah tertentu yang tidak memiliki tanggung jawab langsung terhadap kebijakan tersebut. Lembaga pemerintah yang memiliki kaitan dengan isu khusus namun mereka tidak memiliki kewenangan langsung dalam pengambilan keputusan, LSM yang berfokus pada bidang yang relevan dengan rencana, manfaat, dan dampak dari suatu kebijakan, serta institusi pendidikan tinggi yang memiliki pengaruh signifikan dalam proses pengambilan keputusan pemerintah, serta Pelaku usaha atau badan usaha yang memiliki keterkaitan dengan suatu kebijakan.

Bryson (dalam Hardiansyah, 2012:190) mengungkapkan bahwa peran aktor diawali dengan melakukan analisis dan penyusunan berdasarkan minat (*interest*) pada suatu kebijakan dan kekuasaan (*power*) dalam memberikan pengaruh terhadap suatu kebijakan. Sehingga *interest* dianggap sebagai minat dan juga kepentingan bagi aktor dalam proses pengambilan keputusan, sedangkan *power* merupakan kekuasaan yang dimiliki oleh aktor dalam memberikan pengaruh, merancang kebijakan dan peraturan yang mendukung keputusan yang sudah dibentuk.

Kemudian peran aktor bisa dikategorikan menjadi empat jenis melalui teknik *Power Versus Interest Grid*, yaitu seperti berikut ini :



Gambar 1. 7 Teknik Analisis *Power Versus Interest Grid*

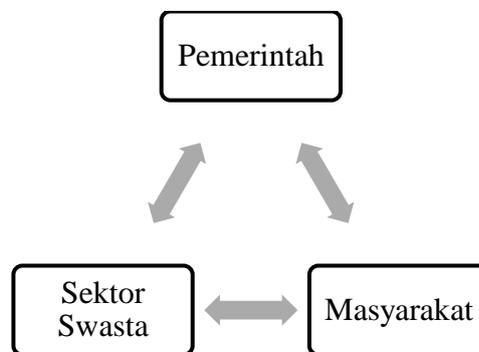
Sumber : Bryson (2004)

1. Aktor dengan kepentingan (*interest*) tinggi tetapi kekuatan (*power*) yang rendah dimasukkan menjadi subjek (*subjects*). Aktor ini tidak dapat mencapai tujuan tetapi dapat berdampak besar pada aktor lain. Aktor ini juga memiliki pengaruh yang besar sehingga hubungan kerja sama masih harus disimpan dengan aman.
2. Aktor yang memiliki kekuatan (*power*) dan kepentingan (*interest*) yang tinggi. Aktor ini sangat terlibat secara penuh, terutama dalam menilai strategi baru, karena dia termasuk dalam kategori pemain kunci (*key players*).
3. Aktor yang memiliki kepentingan (*interest*) dan kekuatan (*power*) yang rendah. Aktor ini masuk dalam kategori pengikut lain (*crowd*), sehingga dalam pelibatan aktor ini harus berdasarkan kepentingan dan pengaruhnya.

4. Aktor pendukung (*context setters*) memiliki kekuatan (*power*) dan kepentingan (*interest*) rendah. Dibutuhkan pengawasan yang ketat karena aktor ini dapat menimbulkan risiko.

Berdasarkan sudut pandang *governance* identifikasi aktor dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori, yakni pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta. Keterlibatan antara masyarakat dan sektor swasta dalam sebuah kebijakan dianggap dapat menghasilkan kerjasama yang mampu mendorong kesuksesan suatu program atau kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.

Kemudian Rosidi & Fajriani (2013) menunjukkan bahwa di dalam *governance* terdapat beragam aktor yang dapat berpengaruh dalam prosesnya, yaitu meliputi :



Gambar 1. 8 Aktor Dalam Governance

Sumber : Abidarin Rosidi dan Anggraeni Fajriani, 2013

1. Pemerintah. Sebagai aktor yang berpengaruh dalam proses tata kelola menjelaskan bahwa pemerintah tidak dapat berdiri sendiri sebagai satu-satunya pihak yang mengelola proses pemerintahan secara eksklusif.

Sebaliknya, pemerintah perlu bekerja sama dengan pemangku kepentingan lainnya karena keterbatasan sumber daya dan kapabilitas yang dimilikinya.

2. Sektor swasta. Selanjutnya pihak swasta yang memiliki sumber daya finansial diharapkan dapat berperan dalam mendukung pemerintah dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan, tanpa mengejar kepentingan pribadi yang melampaui kepentingan umum.
3. Masyarakat. Selain itu, masyarakat juga diminta untuk aktif berpartisipasi dalam upaya untuk meningkatkan kualitas hidup mereka dan mencapai kemandirian dalam proses perkembangan masa depan.

1.6.7 Peran Aktor

Peran adalah interaksi sosial yang menciptakan harapan tentang perilaku individu dalam menjalankan kehidupannya. Riant Nugroho (2014) mengungkapkan kategori peran aktor pada proses pembangunan berdasarkan kedudukannya, meliputi :

1. Pembuat kebijakan (*policy creator*) adalah aktor yang mempunyai wewenang untuk mengambil keputusan dan menentukan kebijakan.
2. Koordinator adalah aktor yang mempunyai tugas untuk melakukan koordinasi dengan aktor lainnya.
3. Fasilitator adalah aktor yang memiliki tugas untuk menyediakan dan mengakomodasi kebutuhan dari kelompok sasaran.
4. Pelaksana (*implementor*) adalah stakeholders yang bertugas untuk menjalankan kebijakan kepada kelompok sasaran.

5. Pendukung (*akselerator*) adalah aktor yang memiliki tugas untuk mempercepat dan berusaha agar program yang dijalankan sesuai tujuan serta dapat meraih tujuan lebih cepat.

Menurut Mathis (2000) terdapat tiga peran aktor dalam mengembangkan suatu objek pariwisata, yaitu meliputi :

1. Regulator, aktor ini memiliki peran dalam membuat suatu peraturan ataupun kebijakan yang berkaitan dengan pengembangan objek wisata.
2. Fasilitator, aktor ini memiliki peran dalam memberikan bantuan dan memenuhi kebutuhan masyarakat untuk meraih tujuan dalam pengembangan pariwisata di suatu wilayah.
3. Pengelola dan pelaksana, aktor ini memiliki peran secara khusus dalam mengembangkan wilayah objek wisata.

Menurut Chifos (2007) dan Meneses (2005) peran aktor dalam pengembangan suatu kelompok masyarakat, yaitu meliputi :

1. Regulator
2. Pemberdayaan
3. Pendampingan
4. Penguatan

Menurut Husnul Yakin (2011, p. 95), untuk mengevaluasi keberhasilan peran aktor dalam proses implementasi kebijakan, empat komponen harus diperhatikan, yaitu :

1. Penilaian peran aktor dalam pelaksanaan kebijakan sebagai partisipasi aktor.
2. Perspektif aktor dilakukan melalui penilaian terkait bagaimana pemahaman para aktor terhadap program yang dilaksanakan.
3. Aksesibilitas aktor dievaluasi dengan melihat bagaimana aktor mendapatkan akses selama menjalankan program.
4. Penentuan tindakan dilakukan melalui penilaian terkait bagaimana peran aktor ketika melakukan penentuan tindakan yang akan dilaksanakan.

Berdasarkan pendapat yang diungkapkan oleh para ahli mengenai teori peran aktor tersebut, penelitian ini mengambil teori peran aktor yang diungkapkan oleh Riant Nugroho (2014), yaitu meliputi :

1. Pembuat kebijakan (*Policy Creator*) memiliki peran utama dalam merancang kebijakan, mengembangkan peraturan terkait dengan sektor pariwisata. Tugas lain aktor yang berperan sebagai pembuat kebijakan yaitu meliputi :
 - a) Merumuskan regulasi atau aturan terkait dengan perkembangan pariwisata.
 - b) Menentukan lokasi untuk pembangunan objek wisata.
 - c) Menetapkan nilai kompensasi atau ganti rugi.
 - d) Memberikan panduan terkait pelaksanaan pekerjaan konstruksi.
 - e) Mengeluarkan peraturan yang berkaitan dengan pembangunan dan perkembangan lokasi wisata.

- f) Mengeluarkan resolusi untuk menangani konflik dalam kasus permasalahan atau sengketa tertentu.
2. Koordinator. Sebagai koordinator, seorang aktor memiliki beberapa peran, yaitu :
- a) Untuk melakukan koordinasi segala aktivitas yang berkaitan dengan program pengembangan pariwisata, baik dalam tahap persiapan maupun pelaksanaan.
 - b) Selain itu, berperan untuk menyelenggarakan rapat dan pertemuan terkait program pengembangan pariwisata, dari tahap persiapan sampai pelaksanaan
 - c) Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan proses konsultasi kepada masyarakat yang terkait dengan program pengembangan pariwisata.
 - d) Serta menjadi koordinator dalam proses pengembangan objek wisata.
3. Fasilitator. Sebagai fasilitator, peran pemangku kepentingan mencakup beberapa aspek, seperti menyediakan anggaran, fasilitas, dan infrastruktur operasional, serta peralatan untuk mengidentifikasi dan menginventarisasi data fisik dan data hukum. Selain itu, pemerintah juga berfungsi sebagai penghubung dalam pengembangan pariwisata, termasuk dalam penyediaan dan bantuan objek wisata. Keinginan para wisatawan untuk melakukan perjalanan akan menghasilkan tuntutan terhadap infrastruktur pariwisata, seperti sistem komunikasi, fasilitas penginapan, dan sejenisnya. Kesiapan fasilitas pariwisata menjadi kunci keberhasilan dalam pengelolaan pariwisata. Pengelolaan objek dan daya tarik pariwisata melibatkan pembangunan dan

pengelolaan objek serta fasilitas yang dibutuhkan. Oleh karena itu, pembangunan dan pengelolaan fasilitas di daerah tujuan pariwisata menjadi penting untuk mendukung pengelolaan pariwisata secara keseluruhan.

4. Pelaksana (*implementor*). Sebagai pelaksana (*implementor*), peran pemangku kepentingan mencakup beberapa tugas, seperti :
 - a) Melakukan pengembangan pariwisata dengan mengidentifikasi dan menginventarisasi data fisik dan hukum.
 - b) Mengelola hak atas tanah, pengembangan pariwisata, dan administrasi terkait lainnya.
 - c) Memberikan informasi lebih lanjut mengenai pengembangan pariwisata kepada pihak yang berkepentingan.
 - d) Menjadi penanggungjawab terhadap berbagai dokumentasi dalam proses pengembangan pariwisata serta administrasi lainnya.
 - e) Selain itu, dalam konteks pengembangan pariwisata, pelaksana juga bertanggung jawab untuk melakukan pembangunan konstruksi di lokasi objek wisata.

5. Akselerator. Akselerator adalah aktor yang berperan dalam memastikan bahwa suatu program terlaksana dengan lancar dan sesuai tujuan yang telah ditetapkan, dan mereka mendukung pelaksanaan program tersebut. Aktor yang memiliki peran sebagai akselerator memiliki tingkat kepedulian yang tinggi terhadap pengembangan pariwisata. Meskipun mereka tidak mempunyai kepentingan langsung dalam kebijakan pengembangan tersebut dan tidak memiliki pengaruh besar dalam proses kebijakan tersebut. Salah

satu contoh stakeholders yang dapat dikategorikan sebagai akselerator dalam konteks pengembangan pariwisata adalah Dinas Pariwisata. Dinas Pariwisata biasanya memiliki peran aktif dalam merancang, mengawasi, dan mendukung inisiatif pariwisata serta berupaya untuk memastikan keberhasilan program-program yang terkait dengan sektor pariwisata.

1.6.8 Pengembangan Pariwisata

Pengembangan pariwisata adalah aktivitas yang dilakukan untuk mendorong suatu daerah atau tempat supaya bisa mendapatkan bantuan penataan ulang berbagai aspek sumber daya pariwisata terkait yang bisa dilakukan dengan pemeliharaan atau penciptaan inovasi baru sehingga memiliki kaitan langsung terhadap keberlangsungan pembangunan pariwisata (Pitana, 2005:56).

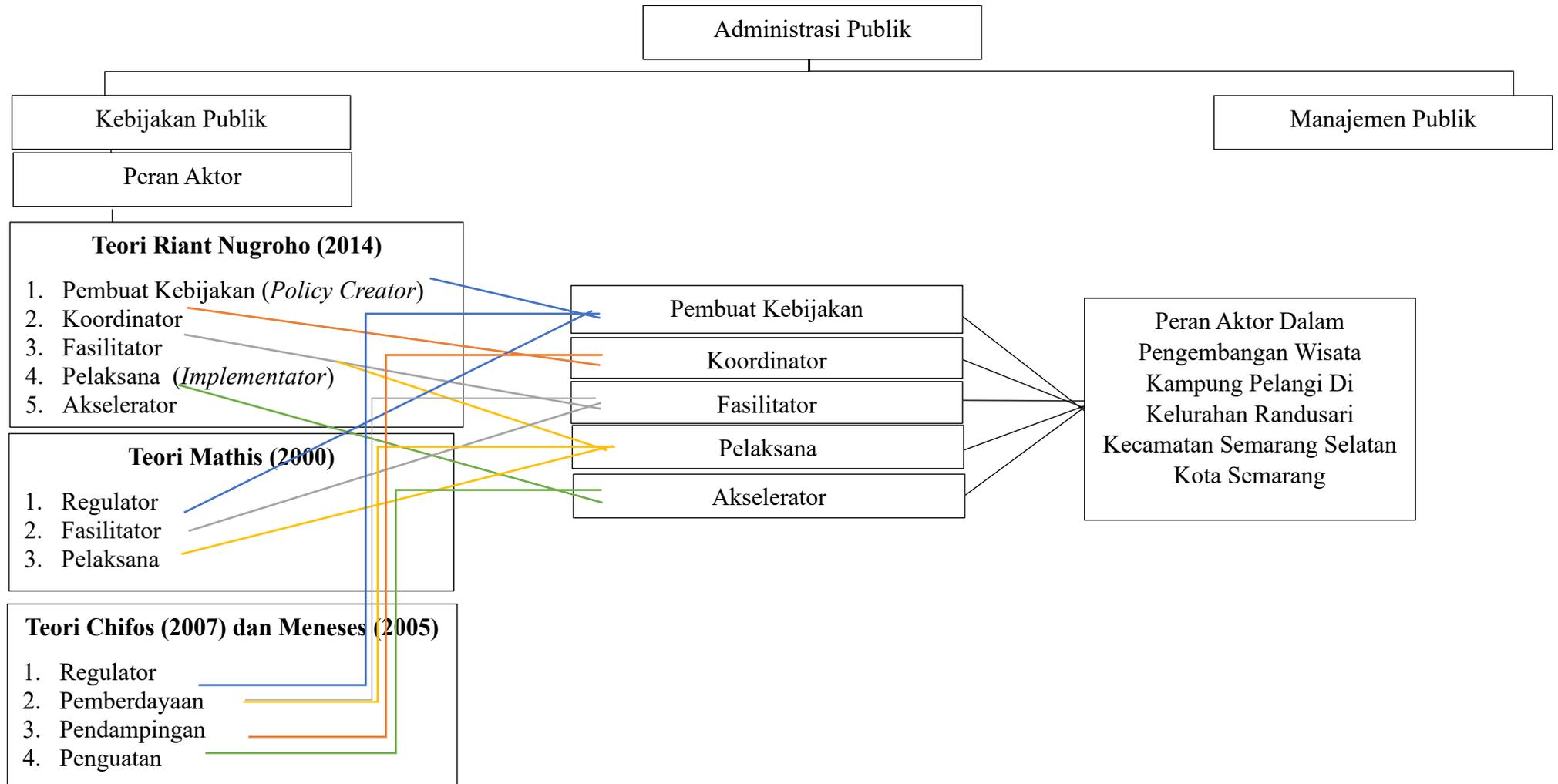
Suwarti dan Yuliamir (2017) mengemukakan bahwa proses pengembangan dalam sektor pariwisata terdapat beberapa elemen penting, yaitu :

1. Manusia, menjadi aspek penting pada proses pelaksanaan seluruh kegiatan pariwisata.
2. Tempat atau lokasi, menjadi unsur fisik yang berfungsi dalam memwadahi seluruh rangkaian aktivitas pariwisata
3. Waktu, merupakan jangka waktu perjalanan yang diperlukan untuk menuju objek destinasi pariwisata.

Cooper dkk (1995: 81) mengungkapkan bahwa dalam pengembangan destinasi wisata dapat tercapai jika memenuhi beberapa unsur seperti berikut ini :

1. Atraksi Wisata (*Attraction*) merupakan ciri khas yang menarik dan mampu memikat wisatawan untuk datang berkunjung ke lokasi objek wisata. Ciri khas yang dapat menarik wisatawan yaitu meliputi daya tarik alam, buatan, ataupun budaya contohnya seperti tarian, festival, dan peringatan acara ulang tahun.
2. Fasilitas Pendukung (*Amenity*) merupakan layanan penunjang yang ada di sekitar objek wisata seperti penginapan, restoran, dan layanan pendukung lainnya yang tersedia selama 24 jam.
3. Aksesibilitas (*Accessibility*) merupakan kemudahan yang tersedia dalam objek wisata tersebut dan dapat dijangkau dengan menggunakan berbagai sarana dan prasarana seperti kendaraan motor, mobil sampai kendaraan umum lainnya.
4. Pelayanan Tambahan (*Ancillary*) merupakan organisasi atau lembaga yang bertanggung jawab dan aktif terhadap pengelolaan, pengembangan, dan pemasaran objek pariwisata. Contoh seperti lembaga yang ikut terlibat dalam pemasaran objek wisata yaitu Pemerintah Daerah atau pemerintah yang bersangkutan, perusahaan swasta, sampai kelompok sadar wisata yang berasal dari masyarakat.

1.7 Kerangka Pikir



1.8 Operasionalisasi Konsep

Penelitian ini difokuskan pada upaya penulis yang akan menjelaskan temuan yang diperoleh secara lebih rinci melalui deskripsi permasalahan kondisi lapangan yang menjadi fokus penelitian. Fokus pengamatan adalah pada fenomena tentang peran aktor dalam pengembangan wisata Kampung Pelangi di Kelurahan Randusari. Penelitian ini akan menyelidiki fenomena dan indikasi sesuai dengan alat dan teori yang menjadi landasan bagi peneliti meliputi :

- 1) Menganalisis peran aktor dalam pengembangan wisata Kampung Pelangi menggunakan teori peran aktor pada program pengembangan atau pembangunan, meliputi :
 - a. Peran sebagai Pembuat kebijakan (*Policy Creator*) adalah aktor yang mempunyai wewenang untuk mengambil keputusan dan menetapkan kebijakan. Pembuat kebijakan bertanggung jawab terutama untuk merancang kebijakan dan mengembangkan peraturan yang berkaitan dengan sektor pariwisata.
 - b. Peran sebagai Koordinator adalah stakeholders yang mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan para aktor lainnya terkait segala aktivitas yang berkaitan dengan program pengembangan pariwisata, baik dalam tahap persiapan maupun pelaksanaan. Selain itu, berperan untuk menyelenggarakan rapat dan pertemuan terkait program pengembangan pariwisata, baik pada tahap persiapan maupun pelaksanaan, sebagai koordinator seorang aktor juga memiliki peran untuk melakukan koordinasi dalam kegiatan

konsultasi publik yang terkait dengan program pengembangan pariwisata, serta menjadi koordinator dalam proses pengembangan objek wisata.

- c. Peran sebagai Fasilitator adalah aktor yang memiliki tugas untuk mewadahi dan memenuhi kebutuhan para kelompok sasaran. Selain itu, sebagai fasilitator peran pemangku kepentingan mencakup beberapa aspek, seperti memberikan alokasi dana, fasilitas, dan infrastruktur operasional, serta menyediakan peralatan untuk mengidentifikasi dan menginventarisasi data fisik dan data hukum.
- d. Peran sebagai Pelaksana (*implementor*) adalah aktor yang bertugas untuk menjalankan kebijakan kepada kelompok sasaran. Sebagai pelaksana (*implementor*) memiliki beberapa tugas seperti melakukan pengembangan pariwisata melalui proses penentuan dan pencatatan berdasarkan data fisik dan hukum, mengatur pembebasan hak atas tanah dalam proses pengembangan pariwisata serta menjalankan administrasi terkait, memberikan informasi lebih lanjut mengenai pengembangan pariwisata kepada pihak yang berkepentingan, menjadi penanggungjawab terhadap berbagai dokumentasi dalam proses pengembangan pariwisata serta administrasi lainnya. Selain itu, dalam konteks pengembangan pariwisata, pelaksana juga bertanggung jawab untuk melakukan pembangunan konstruksi di lokasi objek wisata.

e. Peran sebagai Pendukung (*akselerator*) adalah aktor yang memiliki tugas untuk mempercepat dan berusaha agar program yang dijalankan sesuai tujuan serta dapat meraih tujuan lebih cepat. Aktor yang memiliki peran sebagai akselerator memiliki tingkat kepedulian yang tinggi terhadap pengembangan pariwisata. Meskipun mereka tidak mempunyai kepentingan langsung dalam kebijakan pengembangan tersebut dan tidak memiliki pengaruh besar dalam proses kebijakan tersebut.

2) Mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat peran aktor dalam pengembangan wisata Kampung Pelangi. Proses identifikasi faktor ini dilakukan untuk mengetahui penyebab belum optimalnya peran aktor dalam pengembangan wisata Kampung Pelangi, yaitu sebagai berikut :

a) Faktor Pendukung

(1) Internal, meliputi banyak organisasi yang terlibat secara sukarela, terdapat organisasi kemasyarakatan yaitu Pokdarwis yang menjalankan pengembangan wisata secara langsung, terdapat kelompok UMKM yang berasal dari masyarakat Kampung Pelangi, serta potensi alam yang dimanfaatkan dengan baik.

(2) Eksternal, meliputi aktor dari luar kepengurusan Kampung Pelangi ikut memberikan bantuan untuk mengembangkan wisata Kampung Pelangi.

b) Faktor Penghambat

(1) Internal, meliputi belum terbentuknya kekompakan antar masyarakat, masih lemahnya organisasi kepengurusan wisata yaitu Pokdarwis Kampung Pelangi, serta anggaran yang masih terbatas untuk mengelola dan mengembangkan wisata Kampung Pelangi.

(2) Ekternal, meliputi menurunnya jumlah wisatawan yang disebabkan oleh pandemi Covid-19 dan penerapan PSBB, keadaan dan situasi objek wisata yang menjadi kurang menarik karena perubahan warna cat pada bangunan wisata, kesulitan untuk menarik minat kerjasama dan komitmen dengan aktor swasta, serta pergantian kepemimpinan Walikota yang menyebabkan perbedaan kepentingan yang diutamakan oleh Pemerintah

1.9 Fenomena Penelitian

Tabel 1. 2 Fenomena Penelitian

Konsep	Fenomena	Gejala
Peran aktor dalam pengembangan wisata Kampung Pelangi di Kota Semarang merupakan peran yang dilakukan oleh beberapa aktor yang terlibat dalam upaya mengembangkan suatu objek wisata supaya dapat mencapai suatu tujuan yang dicita-citakan dalam pengembangan wisata. Peran		

aktor dalam pengembangan wisata kampung Pelangi antara lain:		
1. Peran aktor merupakan pemetaan aktor yang terlibat serta peran penting yang dijalani dalam proses pengembangan wisata Kampung Pelangi.	1. Peran Aktor	1) Peran sebagai Pembuat Kebijakan
		2) Peran sebagai Koordinator
		3) Peran sebagai Fasilitator
		4) Peran sebagai Pelaksana
		5) Peran sebagai Pendukung (<i>Akselerator</i>)
2. Faktor yang menyebabkan peran aktor dalam pengembangan wisata Kampung Pelangi menjadi terhambat dapat dilihat melalui faktor pendukung dan juga penghambat.	1. Faktor Pendukung 2. Faktor Penghambat	1. Internal
		2. Eksternal

Sumber : Diolah oleh Peneliti, (2024)

1.10 Metode Penelitian

1.10.1 Tipe Penelitian

Pada penelitian ini memakai metode penelitian berjenis kualitatif atau dengan pengumpulan data bukan berdasarkan angka. Data ini bisa dikumpulkan dengan melakukan proses wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, serta dokumen resmi lainnya. Jadi hal ini bisa dijadikan sebagai tujuan dalam penelitian kualitatif melalui suatu fenomena yang dilakukan dengan lebih rinci dan lebih mendalam terhadap analisis peran aktor dalam pengembangan wisata Kampung Pelangi di Kecamatan Randusari, Kota Semarang.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif, yaitu dilakukan secara terbatas dalam usaha menyelesaikan permasalahan yang ada. Jadi sifatnya hanya sekedar untuk memberikan fakta dan penggambaran dengan objektif terkait kondisi aslinya pada obyek yang dilakukan penelitian.

1.10.2 Lokus Dan Fokus Penelitian

Pada penelitian ini lokus penelitian dilaksanakan di Kelurahan Randusari, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang khususnya di Kampung Pelangi yang dapat memberikan informasi terkait bagaimana keadaan yang ada disana. Pemilihan lokasi ini dengan mempertimbangkan beberapa lokasi, sehingga menciptakan keefektifan waktu serta memberi kemudahan pada saat proses pengumpulan data. Selain itu, pemilihan lokus ini juga berkaitan dengan fokus penelitian yaitu terkait dengan bagaimana Peran Aktor Dalam Pengembangan Wisata Kampung Pelangi di Kelurahan Randusari, Kota Semarang.

1.10.3 Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini, subjek penelitian berfungsi sebagai pihak yang memberikan data yang berguna mengenai topik penelitian. Teknik pengambilan subjek penelitian yang diterapkan adalah *purposive sampling*. Menurut Sugiyono (2014: 301) teknik *purposive sampling* diterapkan melalui pertimbangan dan memiliki tujuan tertentu.

Untuk menentukan subjek penelitian, seorang peneliti memiliki kriteria tersendiri yaitu merupakan individu yang berpartisipasi dalam kegiatan yang diteliti, serta orang yang memahami dan mengetahui informasi yang berkaitan

dengan penelitian. Sedangkan teknik merupakan metode pengambilan sampel di mana setiap individu dalam populasi mempunyai peluang untuk diambil sebagai sampel.

Berdasarkan hal tersebut, subjek penelitian pada penelitian ini dipilih dengan kriteria tertentu dan beberapa orang yang melatarbelakangi penelitian sebagai sumber informasi seperti berikut ini :

1. Pemerintah terlibat secara langsung dan berpartisipasi secara signifikan dalam proses penelitian. Dalam penelitian ini, subjek penelitian berasal dari pemerintahan, khususnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang dan Lurah Kelurahan Randusari.
2. Selain itu, terdapat masyarakat sekitar yang tinggal di wilayah Kampung Pelangi pasti memiliki kaitan erat terhadap aktivitas atau bidang yang dijadikan sebagai kajian penelitian seperti kelompok masyarakat termasuk Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Kampung Pelangi, serta Ketua RW 03 Kelurahan Randusari.

Tabel 1. 3 Pemilihan Informan

No	Status	Teknik Pemilihan	Populasi	Jumlah
1.	Kepala Bidang Kelembagaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang	Purposive Sampling	1	1
2.	Lurah Kelurahan Randusari	Purposive Sampling	1	1
3.	Ketua Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Kampung Pelangi	Purposive Sampling	1	1

4.	Ketua RW 03 Kampung Pelangi	Purposive Sampling	1	1
Total				4

1.10.4 Jenis Data

Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif. Menurut pendapat Muhadjir (1998:29) data kualitatif terdiri dari kata verbal bukan angka. Jadi, data kualitatif merupakan sekumpulan data yang dibuat dengan kata-kata lisan (tertulis) tidak dalam bentuk numerik (angka) dan hanya bisa diukur secara tidak langsung.

1.10.5 Sumber Data

Data dalam penelitian kualitatif bersumber dari ungkapan dan perilaku yang diamati. Data lainnya yang dapat mendukung penelitian kualitatif termasuk dokumen dan lainnya (Lofland dan Lofland (dalam Moleong, 2013:157)). Jadi sumber penelitian merupakan suatu informasi yang didapat oleh seorang peneliti yang berguna untuk memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang ada pada penelitian. Data yang menjadi landasan penelitian ini berasal dari dua sumber utama, yaitu :

1. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah peran aktor dalam pengembangan wisata Kampung Pelangi di Kelurahan Randusari, Kota Semarang. Data ini diperoleh langsung oleh peneliti melalui interaksi langsung di lapangan, baik melalui wawancara maupun observasi dari sumber pertama.

2. Data sekunder merupakan informasi yang dikumpulkan dari sumber-sumber yang telah ada sebagai sumber pendukung, bukan melalui pengumpulan langsung oleh peneliti. Data sekunder dapat berupa dokumen yang tersusun secara rapih seperti dari internet, jurnal, buku, atau dokumentasi yang berhubungan dengan penelitian yang dilaksanakan ini yaitu berjudul peran aktor dalam pengembangan wisata Kampung Pelangi di Kelurahan Randusari, Kota Semarang.

1.10.6 Teknik Pengumpulan Data

Agar memperoleh informasi yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan yang ditetapkan, pendekatan *purposive sampling* dipilih oleh peneliti untuk menemukan fakta-fakta yang terkait melalui bantuan dari informan. Sehingga untuk mendapatkan data berkualitas tinggi, Metode pengambilan data yang dipilih untuk penelitian ini mencakup :

1. Wawancara

Dalam teknik wawancara, peneliti melakukan penyusunan pertanyaan terlebih dahulu secara urut. Setelah pertanyaan tersebut dibuat maka dapat diajukan kepada beberapa subjek penelitian yang sudah ditentukan seperti kepada pemerintah, sektor swasta, dan sekelompok masyarakat yang memiliki kaitan yang erat dengan penelitian.

2. Observasi

Penelitian ini akan menggambarkan pengamatan lapangan yang langsung dilakukan di Kampung Pelangi, yang terletak di Kelurahan Randusari, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang.

3. Dokumentasi

Peneliti juga memanfaatkan metode pengumpulan data melalui dokumentasi sebagai bagian dari penelitian ini untuk memeriksa informasi yang disimpan dalam berbagai bentuk, termasuk dokumen, surat, catatan harian, cenderamata, hasil rapat, dan foto.

1.10.7 Analisis Dan Interpretasi Data

Analisis deskriptif kualitatif menjadi metode analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Miles, Huberman, dan Saldana (2014:31-33), rute untuk analisis data deskriptif kualitatif termasuk :

1. Kondensasi Data

Proses yang dilakukan dalam kondensasi data adalah dengan memilih, menyederhanakan, mengabstrakan, serta mentransformasi data secara menyeluruh. Data- data yang dikumpulkan ini berasal dari berbagai sumber seperti catatan di lapangan, transkrip wawancara, dokumen dan materi yang mendukung. Peneliti melakukan kondensasi data dengan melakukan peringkasan dari hasil wawancara, observasi, serta dokumentasi yang terkait dengan penelitian sehingga melalui data-data tersebut peneliti dapat memperoleh data dan pemahaman lebih lanjut saat melakukan analisis data.

2. Penyajian Data

Informasi disusun dan disajikan melalui proses pengumpulan data yang dapat membantu peneliti untuk proses selanjutnya yaitu penarikan kesimpulan serta pengambilan keputusan. Setelah kondensasi data dilakukan maka dilanjutkan dengan memunculkan data. Dalam penelitian kualitatif, data disampaikan melalui format naratif yang singkat, tabel, serta lainnya. Namun, penelitian kualitatif sering menggunakan teks naratif untuk penyajian data hasil wawancara dari para informan, serta penggunaan tabel dan bagan untuk mempermudah pemahaman data hasil penelitian bagi para informan. Pemanfaatan tabel dan diagram dapat memperkaya proses analisis data, yang pada akhirnya akan menghasilkan penelitian yang lebih menarik.

3. Penarikan Kesimpulan.

Penarikan kesimpulan menjadi tahap akhir dalam interpretasi data yang dilakukan dengan menemukan makna dari data yang disajikan. Sehingga dapat dilihat bagaimana peran aktor dalam pengembangan wisata Kampung Pelangi di Kelurahan Randusari, Kota Semarang. Namun, data yang tercatat masih bersifat sementara dan mungkin dapat diperbarui seiring dengan munculnya bukti yang lebih kuat. Maka perlu dilakukan verifikasi kesimpulan melalui pemikiran ulang saat penelitian dan melihat kembali pada tahap kondensasi dan penyajian data, untuk memastikan kesimpulan yang dihasilkan relevan dan tidak menyimpang.

1.10.8 Kualitas Dan Validitas Data

Metode kualitas dan validitas data yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi. Menurut Tjetjep dalam Tohirin (2011: 76), Triangulasi adalah suatu tahapan yang dilakukan untuk meninjau keabsahan data dengan menggunakan indikator lainnya yang dapat memberikan bukti secara pasti. Terdapat empat jenis triangulasi, menurut Moleong (2013: 330), yaitu triangulasi sumber, triangulasi metode, triangulasi penyidik, dan triangulasi teori.

Triangulasi sumber adalah jenis triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini. Menurut Patton dalam Moleong (2013: 330), triangulasi sumber terjadi ketika informasi dibandingkan dan dievaluasi menggunakan berbagai alat dan waktu. Pada penelitian ini, data dari tiga kelompok sumber data dievaluasi untuk melakukan triangulasi sumber, yaitu pemerintah, sektor swasta, dan kelompok masyarakat.

Berdasarkan ketiga sumber tersebut maka akan dilakukan pengujian keabsahan terkait informasi sumber apakah mendukung dan sesuai dengan penelitian atau tidak. Sehingga triangulasi sumber ini dijadikan sebagai cara dalam memeriksa terkait keabsahan data untuk menyempurnakan, memvaliditas data, keakuratan informasi, serta originalitas banyak sumber untuk penelitian kualitatif.